

**PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI



**MUH. ADRIAN
NIM :105731113619**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. ADRIAN

NIM: 105731113619

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memporeleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**”Jangan Bahagia Yang Membuatmu Bersyukur Tapi
Bersyukurlah Agar Kamu Bahagia”**

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya
Bapak Mashuri dan Ibu Herawati yang telah senantiasa
memberikan doa dan dukungan moral yang
tak terhingga**

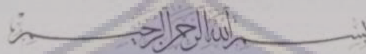
PESAN DAN KESAN

**Jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru Karena
hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan
pernah dimenangkan**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iara Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : Muh. Adrian

No. Stambuk/ NIM : 105731113619

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah di periksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Mutiarni, SE., M.Si
NIDN. 0930087503

Pembimbing II

Nurhidayah, SE., M.Ak
NIDN. 0917069301

Mengetahui

Dekan

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 851 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung irqq Lt. 7 Tel (0411) 866972Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Muh, Adrian, Nim 105731113619 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0010/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H/ 29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

29 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni., S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Linda Arisanty Rasak, SE., M.Si., Ak.CA
2. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si
3. Masrullah, SE., M.Ak
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung irqa Lt. 7 Tel (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Adrian
Stambuk : 105731113619
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

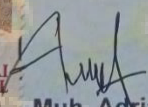
Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,




Muh. Adrian
Nim: 105731113619

Diketahui Oleh:


Dekan,
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507


Ketua Program Studi
Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Adrian
Nim : 105731113619
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

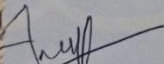
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 29 Juli 2023



1 membuat Pernyataan,


Muh. Adrian
Nim: 105731113619

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di ucapkan atas segala berkat dan karunia Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Makassar)**“. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini di buat bermaksud dan bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Mashuri** dan ibu **Herawati**, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muttiarni, SE., M.Si , selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurhidayah, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi setiap melakukan keputusan kepada peneliti dalam mencari ilmu.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi akuntansi Angkatan 2019 Kelas AK D. Beserta sahabat-sahabat saya yaitu Mudmainnah, Sardedi Anugrah, Widya Putri Ramadani, Mutmainnah dan Rapa- Rapa Squad yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 29 Juli 2023

Muh. Adrian

ABSTRAK

Muh. Adrian, 2023, Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar). Skripsi program studi Akuntansi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Muttiarni dan Ibu Nurhidayah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang beralamat di jalan urip sumohardjo no. 8. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear berganda yang diolah menggunakan Aplikasi SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil uji regresi secara parsial, (2) Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makasssar berdasarkan hasil uji regresi secara parsial.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Muh. Adrian. 2023, *The Effect of Public Sector Accounting and Internal Supervision on the Performance of Makassar City Environmental Service. Thesis of Accounting Studi Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by MUttiarni And Nurhidayah.*

This study aims to determine whether public sector accounting and internal control have an effect on the performance of Makassar City Environmental Service. This research was conducted at the Makassar City Environmental Service, having its address at jalan urip sumohardjo no. 8. The type of research used in this research is quantitative research. This research is a quantitative research using multiple linear regression model which is processed using SPSS.

Based on the results of this study indicate that (1) public sector accounting has a positive and significant effect on performance of government agencies based on partial regression test results, (2) internal control has a positive and significant effect on the performance of government agencies Makassar City Environmental Service based on the results of regression test partial.

Keywords : Public Sector Accounting, Internal Supervision, Agency Performance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	6
2. Standar Akuntansi Pemerintah.....	15
3. Pengawasan Internal	17

4. Kinerja Instansi Pemerintah	20
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pikir	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Sumber dan Data Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Definisi Operasional Variabel	33
G. Metode Analisis Data	37
H. Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum.....	39
B. Deskripsi Data dan Responden	48
C. Hasil Penelitian.....	51
D. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 2.3 Tabel Skala Ordinal	36
Tabel 4.1 Deskripsi Olahan Kuesioner	48
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja	50
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel 4.6 Uji Validitas	52
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.8 Deskripsi Data Penelitian.....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	57
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis.....	60
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir.....	28
4.1 Gambar Struktur Organisasi.....	41
4.2 Gambar Uji Normalitas.....	56
4.3 Gambar Diagram Scatterplot Heterokedastisitas.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dalam sektor publik beragam dan sangat dielukan masyarakat, khususnya untuk pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang baik juga akan berdampak baik pada kesejahteraan mereka. Namun situasi ini umumnya dianggap sebagai masalah mendasar di setiap organisasi nonprofit atau dalam suatu negara disebut pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah sering mengkhianati kepercayaan publik dengan kinerja yang buruk atau biasa-biasa saja. Pengaruh kepentingan merupakan salah satu ciri budaya yang sering dijumpai oleh aparatur pemerintah daerah. Kepentingan ini beragam seperti kepentingan politik, kerja ilegal, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan pemborosan dana oleh oknum tertentu.

Pendapat publik tentang pemerintah saat ini sangat mengidentifikasi stigma yang di bangun untuk mendukung operasional pemerintah daerah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap operasional pemerintah daerah dipandang berpotensi mempengaruhi sejauh mana efektifitas dan efesiensi aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan tegas atau disebut juga dengan istilah *good governance*. Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu terpenting saat ini. Model pemerintahan lama sudah tidak sesuai dengan tatanan sosial saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus dijawab oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan memberikan upaya pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy, 2017).

Berkaitan dengan kinerja pemerintahan, maka salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pemerintah pada sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program kegiatan (Kusnendar, 2018). Namun, berbeda dengan Bahgia (2020) dan Wiwaha dan Suryanthi (2018) menyatakan kinerja tidak dapat dilihat dari input atau perencanaan program saja, tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, mamfaat, dan outcome dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja instansi pemerintah adalah bagian dari isu kebijakan yang strategis karena peningkatan kinerja instansi pemerintah saat ini berdampak pada upaya menciptakan *good governance*. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga memiliki implikasi ekonomi dan politik yang luas. Mengukur dan mengevaluasi kinerja penting karena meningkatkan kualitas

dan konsistensi informasi merupakan tugas penting. Ada beberapa kasus yang melibatkan kegiatan instansi pemerintah yang di laporkan oleh BPK, antara lain kelemahan pengendalian intern dan ketidakpastian regulasi

Dalam konsep *good governance*, pemerintah berperan dalam memberikan pelayan sosial kepada masyarakat yang dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan. Menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), perlu mengoptimalkan prinsip-prinsip *good governance* yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan pelayan publik yang berkualitas. Untuk mencapai *good governance* perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja di Indonesia di atur oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang bersumber dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini bisa efektif jika seluruh unsur yang terlibat dan pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk beroperasi secara bersamaan dan berkelanjutan. Agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik, sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi sebagai panduan untuk

kinerja dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP, yaitu peraturan pemerintah NO. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, disebutkan bahwa inspektorat kabupaten/kota adalah badan pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di peroleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian dalam tulisan ini bisa menjadi tambahan literatur atau refesensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Akademisi dan pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama di masa yang akan datang.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal pada instansi pemerintah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politilk, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya terkait dengan upaya menghasilkan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Haryanto, dkk. (2017) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Bastian (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya termasuk pemerintah daerah, BUMN, LSM, yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Biduri (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama

yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) bahwa akuntansi sektor publik adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan keuangan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan yang digunakan untuk pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

a. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Munculnya studi akuntansi sektor publik di kurikulum nasional merupakan hal yang tepat untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapatkan

organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Akuntansi sektor publik di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yaitu :

- 1) Akuntansi pemerintah pusat
- 2) Akuntansi pemerintah daerah
- 3) Akuntansi partai politik dan LSM
- 4) Akuntansi yayasan
- 5) Akuntansi pendidikan dan kesehatan
- 6) Akuntansi tempat peribadaan

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Lembaga sektor publik masih memiliki banyak peluang untuk memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumber dayanya. Kinerja sektor publik bukan hanya soal teknis, tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat yang sangat penting dan signifikan. Akuntansi sektor publik berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan dan transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga-lembaga sektor publik.

Tidak ada hal yang diciptakan tanpa tujuan akuntansi keuangan, begitu pun dengan Akuntansi Sektor Publik. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya akuntansi sektor publik yang dijelaskan oleh American Accounting Association 1970 (Jamaluddin Majid, 2019) :

- 1) Accountability, Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manager sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggung jawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuannya ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan serta penggunaan anggaran publik
- 2) Management Control, Tujuan dari adanya akuntansi sektor publik adalah dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga/organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam organisasi/lembaga.

Berdasarkan definisi di atas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis serta alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi dapat memberikan informasi yang memungkinkan bagi para manajer untuk melaporkan pelaksanaannya.

c. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus bermanfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor

swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkungan operasi. Komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018) antara lain:

a. Faktor ekonomi meliputi antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Tingkat inflasi
- 3) Tenaga kerja
- 4) Nilai tukar mata uang
- 5) Infrastruktur
- 6) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

b. Faktor politik meliputi antara lain:

- 1) Hubungan negara dan masyarakat
- 2) Legitimasi pemerintah
- 3) Tipe rezim yang berkuasa
- 4) Ideologi negara
- 5) Elit politik dan massa
- 6) Jaringan internasional
- 7) Kelembagaan

c. Faktor kultural meliputi antara lain:

- 1) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- 2) Sistem nilai di masyarakat
- 3) Historis

- 4) Sosiologi masyarakat
- 5) Karakteristik masyarakat
- 6) Tingkat pendidikan

d. Faktor demografi meliputi antara lain:

- 1) Pertumbuhan penduduk
- 2) Struktur usia penduduk
- 3) Migrasi
- 4) Tingkat kesehatan

d. Elemen Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2014) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain:

1) Perencanaan publik

Dalam hal ini, perencanaan adalah hal yang paling penting untuk diketahui. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan masa depan yang tepat, terutama melalui serangkaian keputusan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan kualitas berterimanya arah dan

tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

2) Penganggaran publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan negara.

Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeliran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau penggunaan anggaran dan manejer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

3) Realisasi anggaran publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran adalah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, implementasi anggaran mengacu pada penyelarasan atau

kontrol sistematis dari proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas keluaran.

Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain.

4) Pengadaan barang dan jasa publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5) Pelaporan keuangan sektor publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6) Audit sektor publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme adalah memposisikan dan mengerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik non pemerintahan, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

7) Pertanggungjawaban publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya di singkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintah kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan Negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelolah organisasinya.

Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggung jawaban pengelola organisasi terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktifitas layanan kepada masyarakat luas.

Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksana APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelola dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan

ekuitas dan pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antara generasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecakupan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggung jawabkan pengelola dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

3. Pengawasan Internal

a. Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Menurut peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan internal adalah diawasi oleh satuan pengawas untuk membentuk organisasi itu sendiri. Dimana unit pengawasan itu bertindak atas perintah pimpinan organisasi, dan bertugas untuk menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan organisasi (Mubarok, Rahmawati, dan Wulandari 2021)

Pengendalian intern atau internal control adalah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu yang telah ditetapkan (Arison 2018)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern merupakan kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai prosedur yang berlaku.

b. Tujuan pengawasan internal

Tujuan pengawasan internal untuk mendorong pemerintah dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan daerah yang semakin lama semakin baik, serta diarahkan pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara keuangan daerah yang bercirikan pada

penerapan *good governance* dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

c. Indikator pengawasan internal

Menurut Swayer`s (2005) menyebutkan bahwa beberapa sarana operasional yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah :

- 1). Organisasi (*organization*), sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya serta efisiensi dan ekonomis.
- 2). Kebijakan (*policy*), suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang dibutuhkan, menjadi pedoman atau membatasi tindakan.
- 3.) Prosedur (*procedure*), merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4). Personalia (*personnel*), orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan untuk kualifikasi untuk melakukan tugas yang diberikan.
- 5). Akuntansi (*accounting*), merupakan sarana Yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas sumber daya.
- 6). Penganggaran (*budgeting*); merupakan suatu pernyataan hasil yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan hal-hal yang harus dicapai sebagai keluaran.

- 7). Pelaporan, kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi membuat keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

4. Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah adalah kondisi mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah dihubungkan dengan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah sesuai kebijakan yang ditetapkan. Aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, dan mengavaluasi kinerja.

Menurut Auditya (2013) Kinerja pemerintah daerah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabarab dari visi, misi dan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Lubis (2020) dan Muda, Maulana, Siregar, & Indra (2018) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat capain dari suatu hasil kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap

kelompok, dengan melalui usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Mulyadi (2015) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

b. Manfaat kinerja pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
 - 4) Sebagai dasar untuk memberikan dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
 - 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
 - 6) Membantu mengidentifikasin apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
 - 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
 - 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- c. Indikator instansi pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009), value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah, tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu : ekonomis (hemat cermat)dalam pengadaan dan alokasi sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (maximizing benefit and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Lebih lanjut Haryanto, dkk (2017) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan *konsep value for money* dalam aktivitas organisasi sektor public. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1) Ekonomis

Ekonomis adalah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, tidak boros dan hemat.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah pemcapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

3) Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output dan proses, maka efektivitas berfokus pada outcome

(hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok *value for money*, namun berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup, perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Sandie Davitra Alfitriady, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2020) Jurnal Akuntansi,	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja	Kuantitatif	1. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi 2. Penerapan sistem pengendalian

	kewirausahaan dan Bisnis Vol. 5 No. 2, Desember 2020 e-ISSN 2527-8215	instansi pemerintah (studi empiris pada OPD kabupaten kepulauan meranti)		intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerinta. 3. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah
2	Reza Zaki Mubarak, Titi Rahmawati, Hilda Kumala (2021) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No 01, Agustus 2021 ISSN: 2746-5624	Pengaruh pengawasan internal dan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja BPPKAD kabupaten brebes	Kuantitatif	1. Pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah 2. Akuntansi sektor publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi daerah 3. Pengawasan akuntansi internal dan akuntansi sektor publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah
3	Bambang Jatmiko (2020) Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 2 September 2020 ISSN: 2339-0832	Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sleman	Kuantitatif	1. Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sleman 2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten sleman

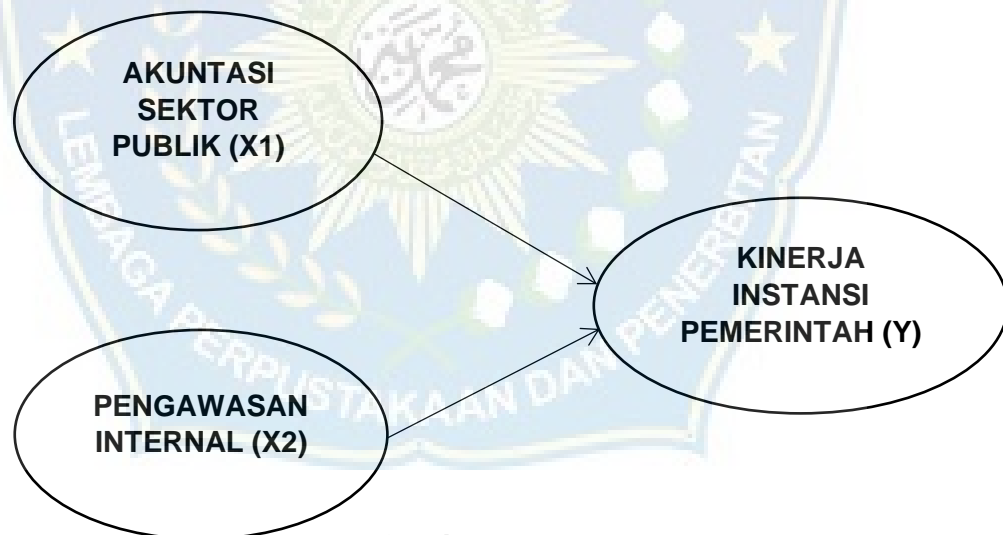
				3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sleman
4	Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurnawan (2020) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2 Juli 2020 ISSN: 2580-510	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan wilayah Jakarta selatan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan tujuan anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan secara parsial dan simultan memengaruhi dan secara signifikan kinerja instansi pemerintah
5	Mattoasi, Didiet Pratama Masue, Yaman Rauf (2021) Jambura accounting review Vol. 2 No. 2 Agustus 2021 E-ISSN 2271-3617	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah	Kuantitatif	Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah agar dapat menetapkan sistem pengendalian internal (SPI) yang lebih efektif
6	Karlina Ghazalah, Sitti Hartini Rachman (2021) Jurnal Vol. 2 No. 1 Oktober 2021 e-ISSN: 2685-4651	Pengaruh penerapan good governance dan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Makassar	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance dan pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota makassar
7	Tasha Widya Sucitra, Iyeh Suptriatna (2020)	Pengaruh maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah dan implikasinya pada pelayanan publik	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan secara langsung , maturitas sistem pengendalian intern pemerintah

		(studi kasus pada pemerintah kabupaten sleman)		tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayan public
8	Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati (2020) Jurnal STIE Semarang Vol. 12 No. 13 Oktober 2020 ISSN: 2085-5656	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dinas perhubungan kota semarang	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, hal ini menunjukkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi
9	Fatrina R. Mooduto, Hartati Tuli, Siti Pratiwi Husain (2022) Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis V0. 5 No. 1 2022 E-ISSN 1622-9551	Pengaruh pengendalian internal dan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi gorontalo	kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengendalian internal dan tunjangan kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai
10	Aurora Febria, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2021) Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 14 No. 1 Mei 2021 e-ISSN: 2476-9460	Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dimoderasi pengawasan internal	kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan signifikan 2. pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap

				<p>kinerja manajerial dengan signifikan</p> <p>3. pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dengan signifikan</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Pengaruh akuntansi sektor publik (x_1) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital menjadi subjek untuk di diskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun akademisi, fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintah, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan sistem perbaikan akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017).

Berdasarkan dari teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

2. Pengaruh pengawasan internal (X_2) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi manajemen, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017)

Berdasarkan dari teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada dinas lingkungan hidup kota Makassar yang terletak pada jalan urip sumohardjo no. 8 tlp (04411) 438381 Makassar provinsi Sulawesi selatan. Lokasi penelitian ini digunakan peneliti sebagai bahan penelitian untuk mendapat data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peneliti. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, mulai 26 Mei – 25 Juni di tahun 2023

C. Sumber dan Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada pegawai kantor dinas lingkungan hidup kota makassar. Selain itu, data yang ditemukan langsung oleh peneliti dilokasi, seperti dokumentasi berupa foto.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Soewadji (2012) yang dimaksud dengan populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau bentuk konsep yang menjadi penelitian. Selanjutnya menurut Sugiyono (2006) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, populasi dari penelitian ini adalah pegawai dinas lingkungan hidup kota Makassar yang ditempatkan pada subbagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian yaitu sebanyak 32 orang.

2. Sampel

Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari jumlah individu yang menjadi objek penelitian. Sampel ditentukan menggunakan sistem sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 32 pegawai dinas lingkungan hidup kota makaasar atau sebanyak populasi yang ada.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari hal-hal yang menyangkut dengan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
2. Daftar pertanyaan (kuesioner), kuisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang duberikan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai response rate (tingkat tanggapan responden).

F. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab, karena adanya variabel yang dipengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Akuntansi sektor publik (X1)

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan

keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan.

b. Pengawasan internal (X2)

Pengawasan internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan selektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

2. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja instansi pemerintah (Y). Peraturan presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 2.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Akuntansi sektor publik (X1)	Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan social, maupun pada proyek-proyek Kerjasama sektor publik dan swasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis bukti transaksi 2. Pencatatan data transaksi 3. Pengikhtisaran 4. Pelaporan 	Ordinal
Pengawasan internal (X2)	Pengawasan swasta berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan mengamankan untuk aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, mendorong terhadap dan ketaatan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi 2. Kebijakan 3. Prosedur 4. Penganggaran 	Ordinal

Kinerja instansi pemerintah (Y)	Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomis (cermat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya). 2. Ordinal Efisiensi (penggunaan sumber daya) 3. Efektivitas (pencapaian tujuan) 	Ordinal
---------------------------------	--	---	---------

Dalam penelitian ini melakukan skala pengukuran yaitu diukur menggunakan skala ordinal. Menurut (Sugioyono, 2018) Skala Ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menggunakan kategori tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur. Penelitian ini menggunakan teknik jawaban:

Tabel 2.3

Tabel Skala Ordinal

Uraian	Skor
Sangat setuju sekali (SSS)	5
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju(S)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

G. Metode Analisis Data

Untuk analisis data, peneliti menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Model regresi linear berganda dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja instansi

X1 = Akuntansi sektor publik (X1)

X2 = Pengawasan internal (X2)

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi dari masing-masing

e = error

1. Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan swewnes (Ghozali dan Akbar, 2012). Uji ini digunakan untuk melihat bagaimana kecenderungan responden terhadap variable.

2. Uji validitas

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur (Soedwaji, 2012). Model pengujian menggunakan pendekatan pearson correlation untuk menguji validitas pertanyaan kuesioner yang disusun

dalam bentuk skala. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 22.

3. Uji reliabilitas

Realibilitas adalah tingkat kemampuan suatu alat atau instrument penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi secara tetap atau konsisten dari individu (Soewadji, 2012) reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data menggunakan metode cronbach alpha (α). pengujian ini dilakukan dengan bantuan computer program SPSS (*Statistical Package for Sosial Scince*). Koefisien cronbach alpha yang lebih besar dari 0,6 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument.

H. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik data kuantitatif. Teknik data kuantitatif merupakan sebuah data yang dapat diukur ukurannya. Maka dari itu, untuk mengetahui 'atau menguji hasil data dari hipotesis jawaban dari sebuah kuesioner, diperlukan pengujian sebagai berikut :

1. Tes T Uji

Untuk menentukan keofisien spesifik mana yang tidak sama dengan nol, diperlukan uji tambahan dengan menggunakan uji t. Signifikansi koefiensi parsial ini memiliki t dengan derajat kebebasan n_k-1 , dan signifikan pada $\alpha = 0,05$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Dinas Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar adalah instansi pemerintah yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini kebijakan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya bernama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 nomor 8), Peraturan Walikota Makassar nomor 93 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup menjadi dasar perubahan nomenklatur dan pada tahun 2017 BLHD bergabung dengan dinas pertamanan dan kebersihan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

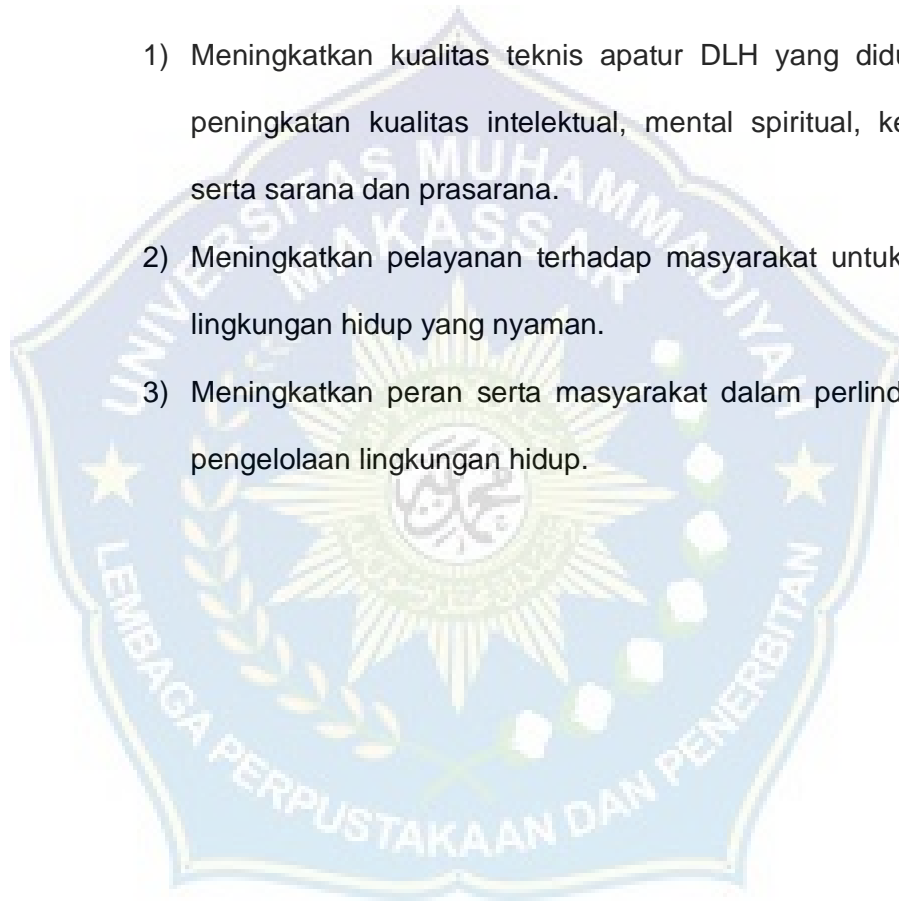
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

a. Visi

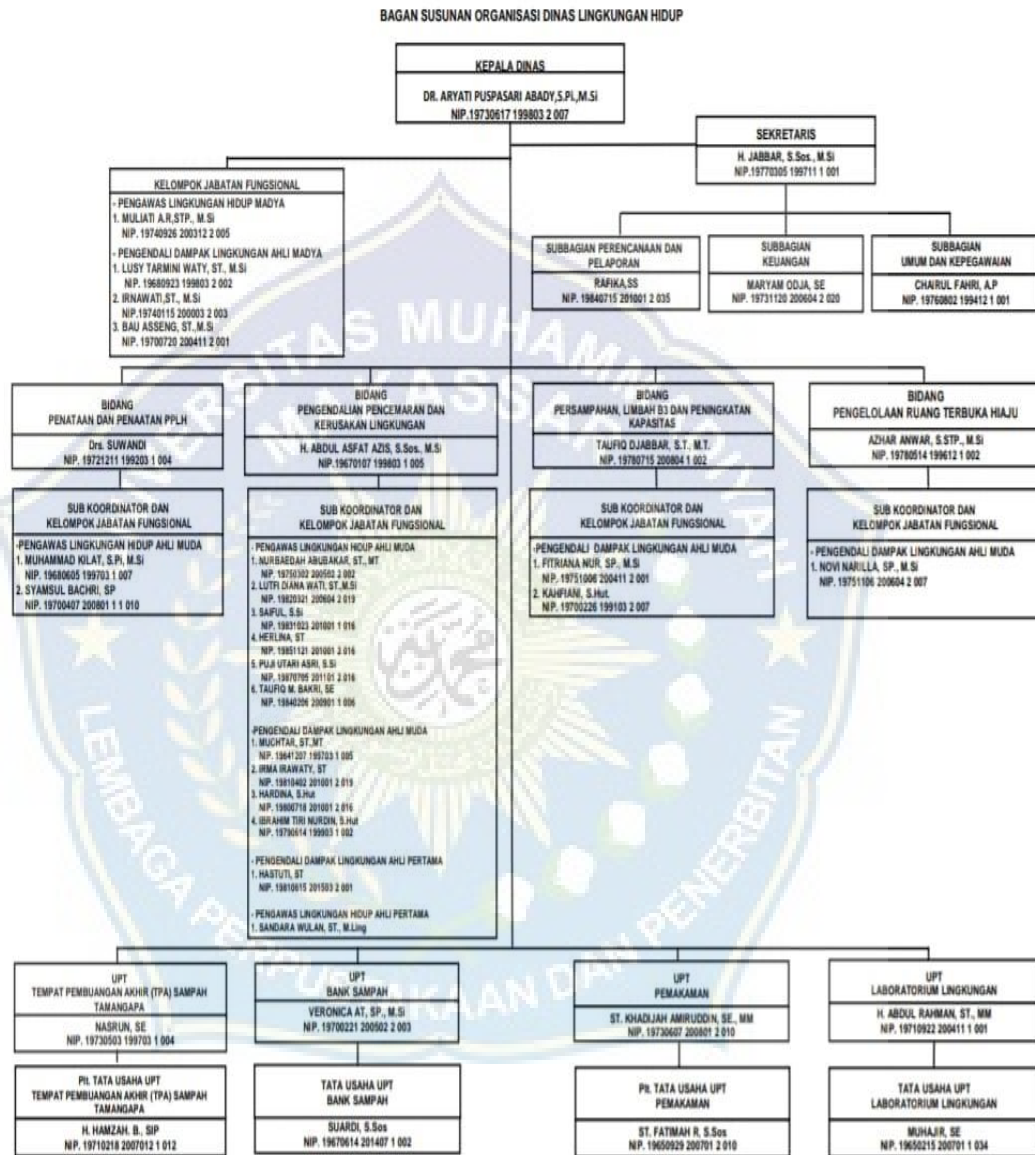
Mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman dan berwawasan lingkungan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas teknis apatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang nyaman.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Gambar 4.1

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar memiliki Tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 5) Pembinaan, pengordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas fungsinya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit di

lingkungan dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pencatatan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian
 - 3) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Subbagian perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kordinasi dan penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :
- a) Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian keuangan, mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a) Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan.
 - c) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akuntansi keuangan.
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumenstasi dan inventarisasi serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a) Perencanaan kegiatan dan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dsn inventarisasi barang serta administraSI kepegawaian.

- b) Pelaksanaan kegiatan dan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
 - c) Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas, bidang penataan dan penataan pph menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 2) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 3) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 2) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 3) Pengordinasian kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

e. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

- 2) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 3) Pengoordinasian kegiatan di Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 4) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
- f. Bidang Pengelolaan Tata Ruang Terbuka Hijau, mempunyai tugas Menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 2) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Pengoordinasian kegiatan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:

- 1) UPT TPA Tamangapa dengan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Makassar Nomor 65 Tahun 2017
- 2) UPT Pemakaman dengan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Makassar Nomor 65 Tahun 2017
- 3) UPT Bank Sampah dengan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2017
- 4) UPT Laboratorium Lingkungan dengan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Makassar Nomor 68 Tahun 2017

B. Deskripsi Data dan Responden

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan cara *personally administered quissionnaires*, kuesioner personal yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Data responden dapat dilihat pada tabel dibawah yang menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan pada penyebaran kuesioner yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Deskripsi Olahan Kuesiner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner dibagikan	32	100%
Jumlah Kuesioner Cacat	0	0%
Total Kuesioner yang Kembali	32	100%

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel sebanyak 32 responden di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Penelitian ini secara langsung memberikan kuesioner kepada 32 responden.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	13	40,6%
Perempuan	19	59,4%
Total	32	100%

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 19 orang atau 59,4%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang atau 40%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	7	21,9%
D3	2	6,3%
S1	22	68,8%

S2	1	3,1%
Total	32	100%

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 7 orang atau 21,9%, D3 sebanyak 2 orang atau 6,3%, S1 sebanyak 22 orang atau 68,8% dan S2 sebanyak 1 orang atau 3,1%. Maka responden tingkat Pendidikan tertinggi adalah S1.

3. Responden Berdasarkan Masa Kerja

Untuk mengetahui responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Persentase
0-5 Tahun	16	50%
6-10 Tahun	12	37,5%
11-20 Tahun	4	12,5%
Total	32	100%

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa data responden berdasarkan masa kerja diatas dapat diketahui bahwa masa kerja 0-5 tahun berjumlah 16 orang atau sebanyak 50%, masa kerja 6-10 tahun berjumlah 12 orang atau 37,5% dan masa kerja 11-20 tahun berjumlah 4 orang atau 12,5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah masa kerja 0-5 tahun sebanyak 16 orang atau 50%.

4. Responden Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Responden Berdasarkan Umur

Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
20-30 Tahun	16	50%
31-40 Tahun	13	40,6%
40-50 Tahun	3	9,4%
Total	32	100%

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 maka disimpulkan bahwa responden berdasarkan umur 20-30 tahun sebanyak 16 orang atau 50%, 31-40 tahun sebanyak 13 orang atau 40,6%, dan 40-50 tahun sebanyak 3 orang atau 9,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas umur responden berdasarkan umur 20-30 tahun sebanyak 16 orang atau 50%.

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Penentuan ini akan menentukan layaknya data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel. Berdasarkan hasil data olahan dilampiran berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.6 dan 4.7 sebagai berikut

Tabel 4.6
Uji Validitas

Variabel	Pearson Corelation	r Tabel	Ket.
Akuntansi Sektor Publik	0,567	0,349	Valid
	0,678		
	0,550		
	0,356		
	0,472		
	0,613		
	0,651		
	0,504		
Pengawasan Internal	0,595	0,349	Valid
	0,479		
	0,563		
	0,440		
	0,460		
	0,573		
	0,670		
	0,633		
Kinerja Instansi	0,678	0,349	Valid
	0,462		
	0,699		
	0,448		
	0,462		
	0,565		
	0,525		
	0,394		

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Dalam tabel 4.6 terlihat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Tabel 4.6 analisis data diketahui bahwa variabel akuntansi sektor publik terdapat 8 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai Pearson Corelation diatas 0,349 dengan signifikan tabel $<0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel. independen (ASP) berkorelasi positif atau memenuhi syarat valid.

- b) Berdasarkan Tabel 4.6 analisis data diketahui bahwa variabel pengawasan internal terdapat 8 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai Pearson Corelation diatas 0,349 dengan signifikan tabel $<0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel. independen (PI) berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid.
- c) Berdasarkan Tabel 4.6 analisis data diketahui bahwa variabel kinerja instansi pemerintah terdapat 8 buah pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai Pearson Corelation diatas 0,349 dengan signifikan tabel $<0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel. independen (KIP) berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid.

Tabel 4.7

Uji Reliabilitas

Reliabilitas	Cronbach Alpha		Ket
Akuntansi Sektor Publik	0,726	0,6	Reliabel
Pengawasan Internal	0,726	0,6	Reliabel
Kinerja Instansi	0,720	0,6	Reliabel

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas Akuntansi Sektor Publik (X1) 0,726, Pengawasan Internal (X2) 0,726, Kinerja Instansi

Pemerintah (Y) 0,720 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Pengujian Analisis Data

Berdasarkan Variabel yang ada dalam penelitian, maka deskripsi statistik sebagai berikut

Tabel 4.8

Deskripsi Data Penelitian

	Akuntansi Sektor Publik	Pengawasan Internal	Kinerja Instansi
N	32	32	32
Mean	34.16	35.06	37.00
Range	11	9	8
Sum	1109	1122	1184
Std. Deviation	2.737	2.651	2.553
Variance	7.491	7.028	6.516
Minimum	28	30	32
Maximum	39	39	40

Sumber Data : Data Olahan (2023)

a. Deskripsi Data Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji data diketahui bahwa data Akuntansi Sektor Publik (X_1) diperoleh nilai terendah 28, rata-rata 34.14, sum 1109, range 11, standar deviasi sebesar 2.737

b. Deskripsi Data Pengawasan Internal (X_2)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji data diketahui bahwa data Pengawasan Internal (X_2) diperoleh nilai terendah 30, rata-rata 35.06, sum 1122, range 9, standar deviasi sebesar 2.651

c. Deskripsi Data Kinerja Instansi (Y)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji data diketahui bahwa data Pengawasan Internal (X_2) diperoleh nilai terendah 32, rata-rata 37.00, sum 1184, range 8, standar deviasi sebesar 2.553

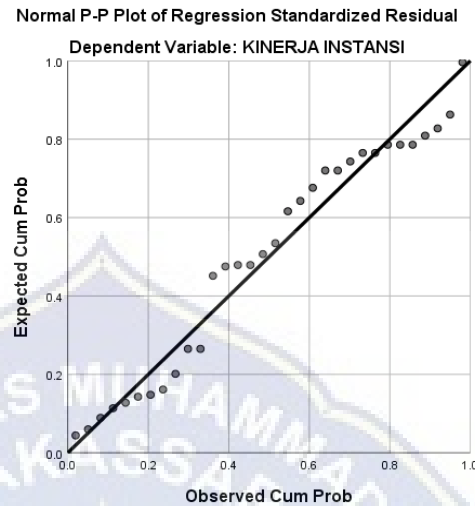
3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi linear berganda yang digunakan. Tujuan analisis asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid. Uji asumsi klasik dalam penelitian terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas.

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah Langkah awal yang harus dilakukan untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (*statistic inferensial*). Pada penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan normal probability plot, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai $p > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel probability plot yang diteliti terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan sebagai

berikut terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini:



Sumber Data : Data Olahan (2023)

Gambar 4.2

Uji Normalitas

Berdasarkan dari normal probability plot di atas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat juga dilakukan dengan menguji nilai residual dengan Kolmogorov-Smirnov. Untuk menguji distribusi residual normal atau tidak, maka dapat dilakukan uji Kolmogov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel 4.10 dibawah ini

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas (K-S TEST)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Ustandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.50136533
Most Extreme Diffenceres	Absolute	.106
	Positive	.102
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber Data : Data Olahan (2023)

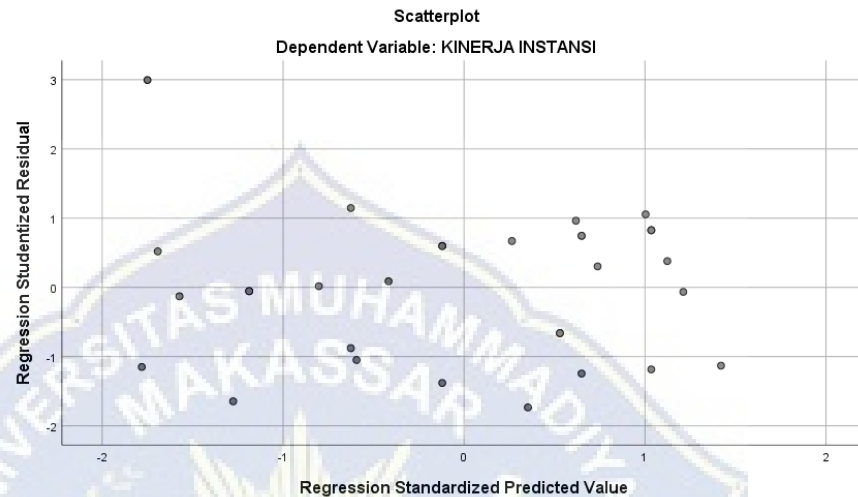
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai K-S sebesar 0,200 (sig 0,106) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1), Pengawasan Internal (X_2), dan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian tersebut secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik scatterplot deketsinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dann Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3

Diagram Scatterplot Heterokedastisitas



Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan pada gambar 4.3 jelas tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas yang berarti model regresi linear ini layak untuk memprediksikan variabel independent.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu menguji apakah modal regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independent. Sebuah model regresi dikatakan multikolinearitas apabila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi linear.

Akibat adanya kesulitan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolinearitas). Tabel 4.10 dibawah ini memperlihatkan uji multikolinearitas.

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.403	1.255		2.712	.011		
	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.221	.064	.273	3.450	.002	.281	3.555
	PENGAWASAN INTERNAL	.743	.066	.771	11.216	.000	.281	3.555

a. Dependent Variable : KINERJA INSTANSI

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance semua variabel lebih besar 0,01 serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

d. Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan mode enter dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dn variabel

dependen. Hasil analisis regresi linear berganda menggunakan program spss yang sudah tercantum pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.403	1.255		2.712	.011		
	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.221	.064	.237	3.450	.002	.281	3.555
	PENGAWASAN INTERNAL	.743	.066	.771	11.216	.000	.281	3.555

a. Dependent Variable

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Dari sumber analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut :

1. Analisis Data Inferensial

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu dilakukan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 3.403 + 0.221x_1 + 0.743X_2$$

Berdasarkan interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah :

a) Konstanta (a)

Ini berarti bahwa jika variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1), Pengawasan Internal (X_2), tidak mengalami perubahan maka nilai Kinerja Instansi (Y) sebesar 3,403

b) Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_1 sebesar 0,221. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami penurunan sebesar 0,221. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Pengawasan Internal (X_2)

c) Pengawasan Internal (X_2)

Nilai koefisien leverage untuk variabel X_2 sebesar 0,743. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,743. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai Akuntansi Sektor Publik (X_1)

2. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini mengetahui dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berikut ini hasil uji regresi (uji t) dicantumkan dalam tabel 4.12 yang telah di bahas pada uji analisis regresi berganda :

- a. Akuntansi Sektor Publik (X_1) menunjukkan *Coefficients* bertanda positif sebesar 0,221 pada tingkat signifikansi 0,002 karena tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi (Y) dengan demikian Hipotesis H1 terbukti.

b. Pengawasan Internal (X_2) menunjukkan *Coefficients* bertanda positif sebesar 0,743 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Pengawasan Internal (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi (Y) dengan demikian hipotesis H2 terbukti.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.12

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981 ^a	.961	.959	.518	1.085

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

b. Dependent Variable: KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sumber Data : Data Olahan (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.12 di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,961. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1), Pengawasan Internal (X_2), terhadap Kinerja Instansi (Y) adalah sebesar 96,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 3,9%.

D. Pembahasan

Pada bagian ini dipaparkan hasil-hasil penelitian dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang dibahas mencakup analisis statistik terhadap dua variabel

bebas yaitu Akuntansi Sektor Publik, dan Pengawasan Internal. Variabel terikat yaitu Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan terhadap hasil-hasil hipotesis sebagai berikut :

1. Hasil Temuan Hipotesis H1 Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) yang dicantumkan dalam tabel 4.11 yang telah dibahas pada uji analisis regresi berganda yaitu : Akuntansi Sektor Publik (X_1) menunjukkan coefficients bertanda positif sebesar 0,221 pada tingkat signifikansi 0,002, karna tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi (Y) dengan demikian hipotesis H1 terbukti.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati (2020) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan dinas perhubungan kota semarang” dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi sektor publik publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan dinas perhubungan kota semarang.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dimana dengan

penerapan akuntansi yang optimal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas lingkungan hidup kota makassar yang menggambarkan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang baik karena sudah diterapkan akuntansi sektor publik dengan baik.

Dengan demikian mengidentifikasi bahwa organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik dengan baik akan meningkatkan kinerja instansi dan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik.

2. Hasil Temuan Hipotesis H2 Pengawasan Internal (X_2)

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pengawasan Internal (X_2). Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) yang dicantumkan dalam tabel 4.11 yang telah dibahas pada uji analisis regresi berganda yaitu : Pengawasan Internal (X_2) menunjukkan coefficients bertanda positif sebesar 0,743 pada tingkat signifikan 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel Pengawasan Internal (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi (Y) dengan demikian hipotesis H2 terbukti.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian sejenis terdahulu oleh Dea Rahma, Novitasari, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2020) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah (studi kasus satuan kerja perangkat daerah kota Semarang)” dalam penelitiannya mengatakan

bahwa pengawasan internal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah.

Menurut peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebut bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak atas kepada pihak bawahannya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Adanya pengawasan tentunya juga akan membantu terlaksananya tujuan dari pemerintah.

Dengan demikian Pengawasan Internal pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar akan lebih terarah dalam pencapaian tujuannya. Selain itu penyimpangan dan penyelewengan juga akan terminimalisir karena satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dilihat dari hasil uji t menunjukkan coefficients bertanda positif, dengan demikian hipotesis H1 terbukti. Jika Akuntansi Sektor Publik diterapkan dengan baik maka Kinerja Instansi juga akan meningkat dan dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dilihat dari hasil uji t menunjukkan coefficients bertanda positif, dengan demikian hipotesis H2 terbukti. Dimana jika Pengawasan Internal dilakukan dengan optimal maka akan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dengan adanya pengawasan yang baik dan optimal maka akan membantu terlaksananya tujuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun sebagai berikut.

1. Diharapkan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar supaya lebih memaksimalkan pengawasan internal dalam meningkatkan kinerja pemerintah

2. Diharapkan peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel baru misalnya, menambah variabel kompetensi sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfitriady, Sandie Davitra, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri. 2020. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti)." *Jurnal Akuntansi* 5(2).
- Amran, Amelia. 2020. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 5(1).
- Aprilianti, Dewi, Mulyaning Wulan, dan Herwin Kurniawan. 2020. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 150–59.
- Arison, Nainggolan. 2018. "Kajian Konseptual Tentang Evaluasi Pedngendalian Manajemen." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 17(02).
- Auditya, Lucy, Husaini Husaini, dan Lismawati Lismawati. 2021. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Fairness* 3(1): 21–42.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Umsida Press.
- Febria, Aurora, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri. 2021. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal." 14(1).
- Gumelar, Ageng, Iyeh Supriatna, dan Endah Dwi Kusumastuti. 2021. "Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta)." 2(1).
- Jamaluddin Majid. 2019. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*.
- Jatmiko, Bambang. 2020. "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7(2): 231–46.
- Mardiasmo. 2009. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: Andi.
- Mattoasi, Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Dan Yaman Rauf. 2021. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jambura Accounting Review* 2(2): 100–109.

- Mohd Idris Dalimunthe. 2021. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Operatur Terhadap Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungan." 6(1).
- Mooduto, Fatrina R, Hartati Tuli, Dan Siti Pratiwi Husain. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo." 5(1).
- Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I Made Sudiartana. 2021. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem." jurnal karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) 1(4).
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahman, Karlina Ghazalah, Dan Sitti Hartini Rachman. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar." 2(1): 25–31.





LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, saya bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul : **“Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)”**.

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiannya.

Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini. Wassalamuallaikum wr.wb

Hormat Saya

Penulis

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Tanggal Pengisian :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

Lama menjabat :

Pendidikan terakhir :

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda check list (v) pada pilihan jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan memilih :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

ST : Sangat Setuju

SSS : Sangat Setuju Sekali



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (X1)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS	SSS
1	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat.					
2	anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.					
3	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran.					
4	anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.					
5	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran.					
6	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus menerus.					
7	Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu.					
8	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya.					

PENGAWASAN INTERNAL (X2)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS	SSS
1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan stándar etika pegawai.					
2	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi.					
3	Pimpinan telah memiliki stándar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing posisi dalam instansi.					
4	Struktur organisasi kantor telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai.					
5	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.					
6	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengawasan internal.					
7	Struktur organisasi kantor sudah menjelaskan mekanisme pengawasan internal organisasi.					
8	Uraian tugas untuk setiap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan sangat jelas.					

KINERJA INSTANSI (Y)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	S	SS	SSS
1	Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
3	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					
4	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.					
6	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan.					
7	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program					
8	Kegiatan / program yang disusun oleh instansi tempat Saya bekerja telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat					

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Responden	Jawaban Kuesioner Akuntansi Sektor Publik X1								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	5	4	5	4	34
2	4	5	5	5	4	5	4	5	37
3	4	4	4	4	5	5	5	3	34
4	5	5	5	4	5	5	5	5	39
5	3	4	4	4	4	4	4	3	30
6	5	5	4	3	5	4	5	5	36
7	4	4	4	3	4	4	4	5	32
8	3	4	5	4	5	5	5	4	35
9	5	5	4	4	4	5	5	5	37
10	4	3	4	4	4	4	4	4	31
11	5	5	4	4	4	4	5	5	36
12	4	5	5	3	3	3	4	4	31
13	4	4	5	4	3	5	5	5	35
14	4	3	4	4	4	3	4	4	30
15	4	5	4	4	4	4	4	4	33
16	5	5	4	4	4	5	5	5	37
17	5	4	4	5	4	5	4	5	36
18	5	5	4	5	5	5	5	4	38
19	3	4	3	4	4	5	5	3	31
20	4	4	5	5	5	4	4	4	35
21	4	4	3	4	4	4	4	5	32
22	4	4	4	5	5	5	5	4	36
23	4	4	5	5	4	4	4	4	34
24	4	3	3	3	4	4	3	4	28
25	5	5	5	5	5	4	5	4	38
26	4	4	5	4	4	5	5	5	36
27	4	5	4	5	4	4	5	4	35
28	4	4	5	4	5	5	5	5	37
29	4	4	4	5	4	4	4	4	33
30	3	4	4	5	4	4	5	4	33
31	5	4	4	4	4	4	5	3	33
32	4	3	3	5	4	4	4	4	31

Responden	Jawaban Kuesioner Pengawasan Internal X2								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	4	4	5	4	4	33
2	5	5	4	3	5	5	4	5	36
3	5	4	5	5	4	4	5	4	36
4	4	4	5	4	5	5	5	5	37
5	4	3	5	4	4	3	4	4	31
6	5	4	5	5	5	4	5	5	38
7	4	4	4	4	4	4	5	4	33
8	4	5	5	5	5	4	5	4	37
9	5	5	5	4	5	5	5	5	39
10	3	4	4	4	4	4	4	3	30
11	5	4	5	4	5	5	5	5	38
12	5	4	4	4	3	4	4	4	32
13	5	4	4	4	5	5	4	5	36
14	4	4	4	3	4	4	5	4	32
15	4	5	5	4	4	5	4	4	35
16	4	4	4	5	4	5	5	5	36
17	5	5	4	5	5	4	5	5	38
18	5	4	5	5	5	5	5	4	38
19	3	3	5	4	5	4	4	4	32
20	5	5	4	4	4	5	5	5	37
21	4	4	3	4	4	4	3	4	30
22	5	5	5	4	4	5	5	5	38
23	4	4	4	4	5	3	5	4	33
24	4	4	4	3	4	4	4	4	31
25	4	5	5	4	4	5	5	4	36
26	4	5	5	5	4	4	5	5	37
27	5	4	5	4	5	5	5	4	37
28	5	4	5	5	4	5	5	5	38
29	5	4	4	5	4	5	5	3	35
30	5	5	5	4	3	4	4	4	34
31	3	5	5	5	4	5	4	4	35
32	4	3	4	5	4	4	5	5	34

Responden	Jawaban Kuesioner Kinerja Instansi (Y)								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	5	4	5	4	4	5	4	35
2	4	5	5	5	5	4	5	5	38
3	5	5	5	5	5	4	5	4	38
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	5	3	4	4	5	4	4	33
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	5	4	4	3	5	4	5	5	35
8	5	4	5	5	5	5	5	5	39
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	4	3	4	5	5	4	3	4	32
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	3	5	4	5	5	3	4	5	34
13	4	5	5	5	4	5	4	5	37
14	4	5	4	4	5	3	4	4	33
15	5	5	5	5	4	3	4	5	36
16	5	5	5	5	4	5	4	5	38
17	5	4	5	5	5	5	5	5	39
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	3	4	5	4	5	4	5	4	34
20	5	5	5	5	5	5	4	5	39
21	3	4	4	4	3	5	5	5	33
22	5	5	5	5	5	5	5	5	40
23	4	5	5	5	5	5	4	3	36
24	5	3	3	5	4	4	5	5	34
25	5	5	5	5	5	5	5	4	39
26	5	5	4	5	5	5	5	5	39
27	5	5	5	4	5	4	5	5	38
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	5	4	4	5	5	5	5	4	37
30	4	4	5	5	4	5	4	5	36
31	4	5	5	4	5	5	5	4	37
32	5	5	4	5	3	4	4	5	35

Lampiran 3 : Uji Validitas dan reabilitas

		Correlations								AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
X1.1	Pearson Correlation	1	.460**	.085	-.007	.158	.109	.212	.440*	.567**
	Sig. (2-tailed)		.008	.645	.968	.387	.551	.243	.012	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	.460**	1	.356*	.035	.108	.211	.456**	.310	.678**
	Sig. (2-tailed)	.008		.046	.850	.557	.246	.009	.085	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	.085	.356*	1	.128	.132	.161	.248	.261	.550**
	Sig. (2-tailed)	.645	.046		.485	.471	.378	.171	.150	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	-.007	.035	.128	1	.194	.211	.111	-.127	.356*
	Sig. (2-tailed)	.968	.850	.485		.288	.246	.547	.487	.046
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.5	Pearson Correlation	.158	.108	.132	.194	1	.307	.376*	-.085	.472**
	Sig. (2-tailed)	.387	.557	.471	.288		.088	.034	.646	.006
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.6	Pearson Correlation	.109	.211	.161	.211	.307	1	.488**	.259	.613**
	Sig. (2-tailed)	.551	.246	.378	.246	.088		.005	.152	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.7	Pearson Correlation	.212	.456**	.248	.111	.376*	.488**	1	.063	.651**
	Sig. (2-tailed)	.243	.009	.171	.547	.034	.005		.730	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X1.8	Pearson Correlation	.440*	.310	.261	-.127	-.085	.259	.063	1	.504**
	Sig. (2-tailed)	.012	.085	.150	.487	.646	.152	.730		.003
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	9

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	PENGAWASAN INTERNAL
X2.1 Pearson Correlation	1	.236	.086	.079	.103	.296	.338	.396*	.595**
Sig. (2-tailed)		.194	.640	.669	.574	.100	.058	.025	.000
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.2 Pearson Correlation	.236	1	.183	.000	-.044	.377*	.116	.194	.479**
Sig. (2-tailed)	.194		.317	1.000	.812	.033	.528	.288	.006
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.3 Pearson Correlation	.086	.183	1	.274	.192	.184	.355*	.142	.536**
Sig. (2-tailed)	.640	.317		.129	.293	.315	.046	.439	.002
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.4 Pearson Correlation	.079	.000	.274	1	.044	.042	.394*	.108	.440*
Sig. (2-tailed)	.669	1.000	.129		.812	.820	.026	.557	.012
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.5 Pearson Correlation	.103	-.044	.192	.044	1	.143	.298	.323	.460**
Sig. (2-tailed)	.574	.812	.293	.812		.435	.098	.072	.008
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.6 Pearson Correlation	.296	.377*	.184	.042	.143	1	.157	.276	.573**
Sig. (2-tailed)	.100	.033	.315	.820	.435		.391	.126	.001
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.7 Pearson Correlation	.338	.116	.355*	.394*	.298	.157	1	.332	.670**
Sig. (2-tailed)	.058	.528	.046	.026	.098	.391		.063	.000
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X2.8 Pearson Correlation	.396*	.194	.142	.108	.323	.276	.332	1	.633**
Sig. (2-tailed)	.025	.288	.439	.557	.072	.126	.063		.000
N	32	32	32	32	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	9

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	KINERJA INSTANSI
Y1	Pearson Correlation	1	.147	.227	.307	.227	.284	.293	.339	.678**
	Sig. (2-tailed)		.421	.211	.087	.211	.115	.104	.058	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y2	Pearson Correlation	.147	1	.395*	.132	.109	.067	.085	.022	.462**
	Sig. (2-tailed)	.421		.025	.472	.554	.714	.645	.907	.008
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y3	Pearson Correlation	.227	.395*	1	.284	.395*	.305	.201	.147	.699**
	Sig. (2-tailed)	.211	.025		.115	.025	.089	.269	.421	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y4	Pearson Correlation	.307	.132	.284	1	.026	.213	-.115	.146	.448*
	Sig. (2-tailed)	.087	.472	.115		.886	.242	.532	.427	.010
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y5	Pearson Correlation	.227	.109	.395*	.026	1	.067	.278	-.175	.462**
	Sig. (2-tailed)	.211	.554	.025	.886		.714	.123	.338	.008
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y6	Pearson Correlation	.284	.067	.305	.213	.067	1	.293	.074	.565**
	Sig. (2-tailed)	.115	.714	.089	.242	.714		.104	.686	.001
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y7	Pearson Correlation	.293	.085	.201	-.115	.278	.293	1	.200	.525**
	Sig. (2-tailed)	.104	.645	.269	.532	.123	.104		.272	.002
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y8	Pearson Correlation	.339	.022	.147	.146	-.175	.074	.200	1	.394*
	Sig. (2-tailed)	.058	.907	.421	.427	.338	.686	.272		.026
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

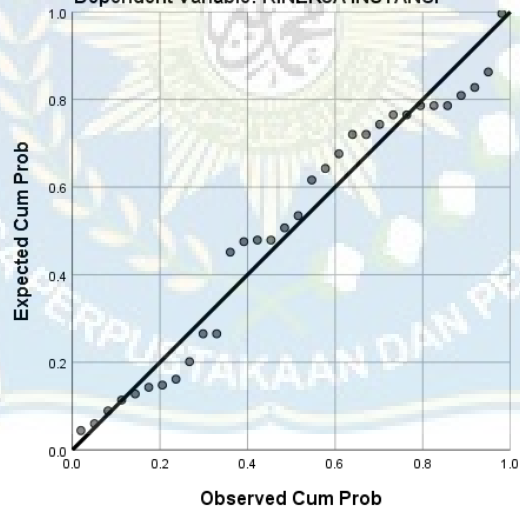
Cronbach's Alpha	N of Items
.720	9

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std.		Skewness	Kurtosis					
							Statistic	Statistic		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	32	11	28	39	1093	34.16	2.737	7.491	-.295	.414	-.670	.809			
PENGAWASAN INTERNAL	32	9	30	39	1122	35.06	2.651	7.028	-.471	.414	-.983	.809			
KINERJA INSTANSI	32	8	32	40	1184	37.00	2.553	6.516	-.397	.414	-1.158	.809			
Valid N (listwise)	32														

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

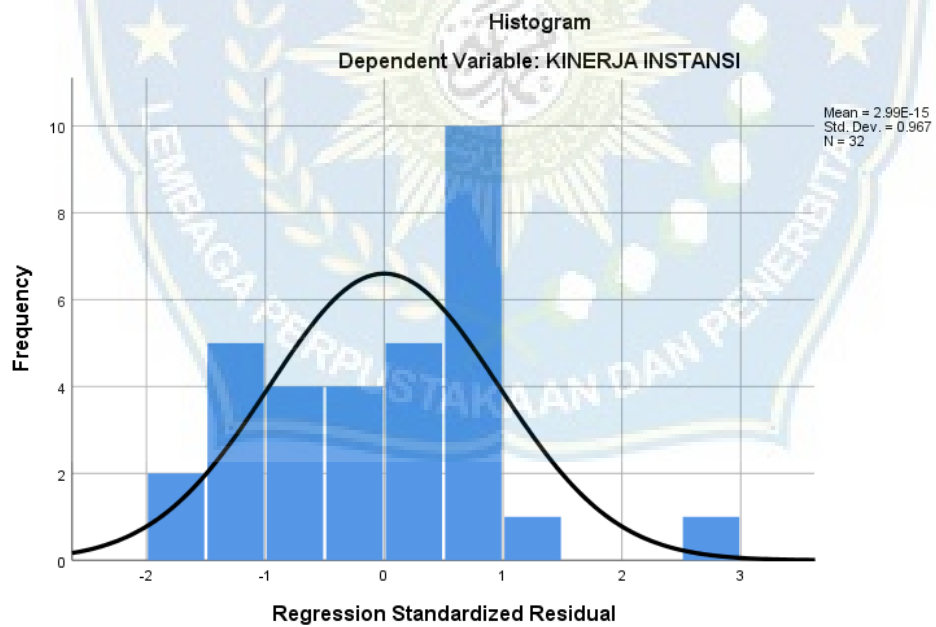
Dependent Variable: KINERJA INSTANSI



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.50136533
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.102
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Lampiran 4 : Dokumentasi



Lampiran 5: Surat Penelitian

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Makassar (Kantor Gabungan Dinas)
dlhmakassar@gmail.com dlhmakassar dlh makassar DLH Kota Makassar Official

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 660.1/ ⁴²⁸³DLH/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARYAM ODJA, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUH. ADRIAN**
Nim / Jurusan : 105731113619 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Judul : **"PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR)"**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dari Tanggal 05 Juni s/d 19 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Juni 2023
a.n. **KEPALA DINAS**
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

MARYAM ODJA, SE
Pangkat : Penata Tk. I
N I P : 19731120 200604 2 020

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASITAN

Tembusan :

1. Kepala P3M UNISMUH;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
4. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 645/05/A.2-II/v/44/2023 Makassar, 22 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh. Adrian

Stambuk : 105731113619

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN
 PENGAWASAN
 INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH
 (STUDI KASUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA MAKASSAR)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
 Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
 Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/470/SKP/DPMPTSP/V/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17510/S.01/PTSP/2023 Tanggal 25 Mei 2023;
5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/475-II/BKBP/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **MUH. ADRIAN**
 NIM / Jurusan : 105731113619 / Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
 Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
 Waktu Penelitian : 26 Mei s/d 25 Juni 2023
 Tujuan : Skripsi
 Judul Penelitian : "PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR)"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 30 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 17510/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
 Lampiran : - Walikota Makassar
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1560/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. ADRIAN**
 Nomor Pokok : 105731113619
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Mei s/d 25 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Lampiran 6: Hasil Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Adrian
 Nim : 105731113619
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

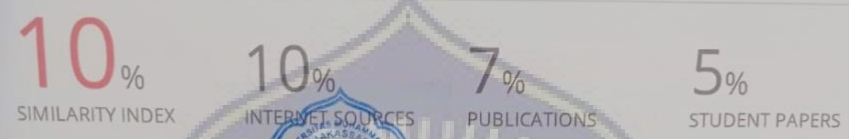

 M.P
 NPM 064591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Muh. Adrian 105731113619 BAB I

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source 2%
- 2 digilib.unismuh.ac.id Internet Source 2%
- 3 repository.radenintan.ac.id Internet Source 2%
- 4 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper 2%
- 5 repository.widyatama.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

Muh. Adrian 105731113619 BAB II

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

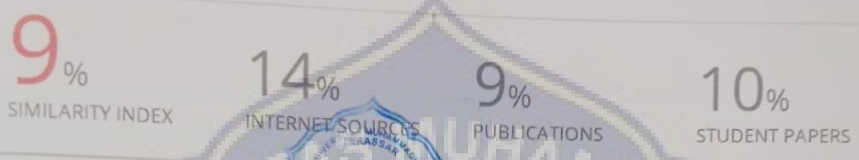
14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	5%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	fexdoc.com Internet Source	2%
4	Mattoasi Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah", Jambura Accounting Review, 2021 Publication	2%
5	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.polban.ac.id Internet Source	2%
7	www.coursehero.com Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	

Muh. Adrian 105731113619 BAB III

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 eprints.walisongo.ac.id Internet Source 2%
- 2 pandaibesi.com Internet Source 2%
- 3 repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source 2%
- 4 text-id.123dok.com Internet Source 2%
- 5 repository.ibs.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

Muh. Adrian 105731113619 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** peraturan.bpk.go.id
Internet Source **5%**
- 2** www.scribd.com
Internet Source **2%**
- 3** Submitted to Colorado School of Mines
Student Paper **2%**

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography



Muh. Adrian 105731113619 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5% INTERNET SOURCES	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	5%
---	---	----

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



FORMULIR
Dipakai untuk...
Nama Odiet
Jenis Naskah

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Adrian, panggilan Adrian/Vhito lahir di Makassar pada tanggal 17 April 2002 dari pasangan suami istri Bapak Mashuri dan Ibu Herawati. Peneliti ini adalah anak pertama dari empat bersaudara. Peneliti ini sekarang bertempat tinggal di Jl. Malengkeri III Lr. 3 No 46 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 004 Kalotok lulus tahun 2013, SMPN 01 Sabbang lulus pada tahun 2016, SMAN 18 Luwu Utara 2016 – 2018, SMAN 05 Luwu Utara lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.